

## BAB VI

### PENUTUP

#### VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berita palsu atau Hoax yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini tidak dapat dianggap sepele, jika tidak maka dampak dan kerugian yang akan dihasilkan sangat banyak. Dari data-data yang didapat menunjukkan tingginya penggunaan media sosial di kawasan Asia Tenggara, dengan itu tingkat penyebaran Hoax akan tinggi dimana mudahnya diakses berita palsu oleh semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara mengajak negara-negara anggotanya membentuk kerangka kerja yang disebut ASEAN Framework to Minimise the Harmful Effects of Fakenews ini guna dijadikan sebagai wadah untuk berkerja sama dalam memberantas permasalahan berita palsu di negara masing-masing anggota. Dari kerangka kerja tersebut negara-negara anggota semakin kiat membasmi Hoaks di negaranya dengan berbagai cara termasuk Indonesia.

Upaya yang dilakukan ASEAN Framework tersebut melalui empat strategi sebagai kerangka kerja ASEAN, yaitu dalam Pendidikan dan Kesadaran, Deteksi dan Respon, Norma dan Pedoman, & Komunitas dan Partisipasi *Ground Up* yang dijadikan Indonesia melalui Kominfo sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam membuat kebijakan untuk memberantas Hoaks atau berita palsu saat pra-pemilu tahun 2019. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi yang disebabkan Hoaks ini beredar di seluruh masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kominfo berdasarkan kerangka kerja tersebut yaitu pemblokiran website yang menyebarkan Hoaks, Penggunaan UU ITE, Artificial Intelligence System (AIS), pembuatan situs resmi cek fakta, literasi digital untuk masyarakat, terlibat dengan komunitas dan melibatkan platform media sosial.

Sejauh ini dengan adanya kerangka kerja tersebut dapat dikatakan belum memberikan dampak perubahan yang banyak dalam menangani Hoax di Indonesia, khususnya pada saat pra-pemilu di Indonesia tahun 2019. Dikarenakan kerangka

kerja ini belum sampai diturunkan menjadi *strategic plan*. Tetapi, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas Hoax sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dari kerangka kerja tersebut.

## VI.2 Saran

Penting bagi pemerintah semua negara anggota ASEAN untuk meninjau kembali komitmen mereka karena dalam realisasinya prioritas negara anggota dalam menangani Hoaks ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing negara yang dapat menghambat kolaborasi regional dalam masalah berita palsu ini. ASEAN sebagai organisasi regional dapat mengambil tindakan untuk mempersempit kesenjangan dan menjembatani kerjasama antar negara melalui forum dan mekanisme yang tersedia. Upaya dari framework ini sendiri agar menjadi efektif harus diturunkan menjadi lebih mendetail kedalam *strategic plan*, kemudian dari *strategic plan* harus didetailkan lagi menjadi inisiatif-inisiatif. Apabila seluruh inisiatif-inisiatif tersebut dapat terlaksana barulah framework tersebut dapat dikatakan efektif.

ASEAN sebagai organisasi regional dan pemerintah negara-negara anggota ASEAN harus menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan media sosial diluar sana untuk menghentikan penyebaran informasi palsu. Dalam membuat solusi jangka Panjang ASEAN juga dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah di negara-negara anggota, solusi ini dapat mencakup perluasan kebijakan tentang literasi media dan pemikiran kritis; merancang inisiatif untuk membangun perilaku konsumsi media yang sehat (misalnya, verifikasi informasi dan membaca seluruh bagian) sebagai norma sosial; dan membantu pelaksanaan langkah-langkah tersebut di atas. Manfaat mendirikan organisasi semacam itu adalah dapat membantu memenangkan kepercayaan warga karena sikapnya yang tidak memihak, dan mengintegrasikan warga dalam perang melawan berita palsu. Dengan demikian, entitas ekstra-pemerintah dapat berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi kemitraan publik-swasta, membangun kepercayaan yang menghasilkan tindakan konstruktif yang menguntungkan pemerintah, industri, dan masyarakat secara keseluruhan (Haciyakupoglu & dkk, 2018).

Program literasi digital di lembaga pendidikan penting dan perlu dikembangkan di Asia Tenggara, dimana program literasi digital banyak ditemukan hanya di tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini, program-program ini harus dibuat oleh pakar akademis dan LSM independen bersama dengan dukungan dari kementerian pendidikan.

Kedepannya, diharapkan AMS dapat mempelajari pengalaman blok regional lainnya khususnya Uni Eropa (UE), yang membentuk Satuan Tugas StratCom Timur UE pada tahun 2015 untuk melawan kampanye disinformasi Rusia. Manfaat dalam mempelajari model-model ini dengan tujuan memperkenalkan strategi serupa yang disesuaikan dengan lanskap budaya dan politik Asia Tenggara. Untuk menghindari over-sekritisasi berita palsu dan sejalan dengan pertemuan AMRI 2017, upaya regional untuk melawan berita palsu dapat dimasukkan dalam rencana aksi Komunitas Sosial Budaya ASEAN (Haciyakupoglu & dkk, 2018).